

PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN-KEMELARATAN, KEBODOHAN-KEMALASAN DAN KEPASRAHAN PADA SITUASI YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN BAGI WARGANYA

Oleh: FX. Sudarsono

Abstrak. Keterkaitan antara kemiskinan-kemelaratan, kebodohan-kemalasan dan kepasrahan terhadap situasi yang tidak menguntungkan begitu erat. Upaya pengentasan yang sifatnya pemberian belas kasih atau karitatif, hanyalah bersifat sementara terangkat, namun mereka akan kembali kepada keadaan semula. Maka upaya pembangkitan dari dalam diri mereka sendiri melalui Pendidikan Luar Sekolah yang cocok dengan kebutuhanlah yang terus berkembang, adalah yang paling tepat dan menjanjikan harapan cerah. Pendidikan Luar Sekolah yang mampu menggugah kesadaran diri akan potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk hidup dan penghidupan, mampu membangkitkan kemauan kerja keras, ulet dan kreatif serta tegar terhadap tantangan, itulah yang akan mampu mengentaskan mereka yang hidup di daerah tertinggal. Jika Pendidikan Luar Sekolah mampu berperan seperti itu, maka tidak ada orang yang mempertanyakan keberadaan dan kemanfaatannya didalam pembangunan khususnya dalam pengembangan kualitas manusia dan kehidupannya.

Makna Pendidikan

Tidak disangsikan lagi bahwa penduduk yang berkualitas merupakan modal pembangunan suatu negara. Oleh karena itu negara-negara yang akan membangun berupaya dengan keras dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan sumber daya manusia lewat pendidikan. Kebutuhan akan tenaga terdidik dan profesional dalam segala bidang tidak dapat ditunda lagi, lebih-lebih di dalam upaya merebut teknologi yang sangat diperlukan di dalam era industrialisasi saat ini. Ketertinggalan di dalam pengembangan sumber daya manusia dapat berakibat semakin tergantungnya suatu negara terhadap negara lain yang lebih maju industrinya di dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan pembangunan.

Jika kita menengok kembali makna dan misi pendidikan pada masa lampau, pendidikan merupakan pembekalan bagi warga masyarakat muda untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan agar dapat berperan sebagai warga dewasa untuk mempertahankan hidup dan kehidupan warga atau sukunya, serta melestarikan adat-budaya. Pendidikan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari oleh orang dewasa atau orang tuanya. Apa yang dipelajarikannya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dan bahan ajar bersumber dari kebutuhan nyata warga atau sukunya. Corak pendidikan semacam ini masih dapat kita jumpai pada masyarakat suku-suku terasing yang hidupnya di tengah hutan atau di dalam gua-gua seperti suku Punan Batu di Bulungan Kalimantan Timur yang belum lama ini ditemukan (Kompas, 6 November 1993, halaman 1 dan 14).

Demikian pula beberapa suku di Propinsi Irian Jaya yang masih hidup di tengah-tengah hutan mereka mengajari anak-anaknya secara langsung berkaitan dengan kehidupannya berburu, mencari ikan serta mengumpulkan hasil hutan, dan melibatkannya di dalam upacara-upacara adat sesuai dengan tingkat usianya. Didalam konteks seperti itu tidak dijumpai masalah kesenjangan antara apa yang diperoleh lewat pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Di dalam perkembangannya kemudian, setelah negara dan pihak swasta melembagakan pendidikan ke dalam bentuk yang dinamakan sekolah, maka misi dan makna pendidikan menjadi semakin kompleks dan semakin menjauh dari kebutuhan nyata masyarakat sekitar atau lingkungan lokal. Negara atau pemerintah berkepentingan untuk menggunakan wahana sekolah guna mendidik atau membina warga muda menjadi warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita dan gambaran yang diinginkan, serta untuk mendidik warga muda melalui pendidikan kewarganegaraan yang ditanamkan lewat kurikulum dan proses sosialisasi politik lewat upacara maupun kegiatan-kegiatan lain baik intra maupun ekstra kurikuler. Di lain segi sekolah juga dimaksudkan untuk memproduksi tenaga-tenaga kerja terdidik guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas baik regional, nasional maupun internasional. Sedang lembaga pendidikan yang diselenggarakan pihak swasta selain melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga mengemban tugas sesuai dengan landasan misi

lembaga swasta tersebut, khususnya yang berazaskan agama.

Oleh karena itu fungsi pendidikan pada masa sekarang ini dapat dilihat dari misi politik untuk mendidik warga menjadi insan yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotik, warga negara yang baik. Untuk negara kita, sebagaimana tercantum di dalam GBHN, tujuan pendidikan nasional adalah:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu perwujudan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian Pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (GBHN, 1993-1998 tentang Pendidikan nasional)

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sejumlah mata pelajaran dan atau mata kuliah ditetapkan pemerintah dan berlaku secara nasional seperti: Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia. Sedang untuk memperlancar proses sosialisasi politik di sekolah dilakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap tanggal 17, selain hari-hari nasional tertentu yang wajib. Pemasangan lambang negara Garuda Pancasila, bendera Merah Putih, Gambar Presiden dan Wakil Presiden serta Pahlawan Nasional, lomba cerdas cermat P4, juga merupakan bagian kegiatan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita seperti tersebut dalam GBHN. Dari misi ekonomi, pendidikan dapat dipandang sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga terdidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat atau pasar kerja. Dari segi sosial kemasyarakatan pendidikan berfungsi untuk mendidik warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat sebagai kesatuan dan menumbuhkan kemauan berperan serta di dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Demikian pula dari segi budaya, diharapkan lewat pendidikan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa dapat di-

wujudkan, dan bukan sekedar pewarisan budaya.

Pendidikan Bagi Masyarakat Tertinggal

Pendidikan bagi masyarakat tertinggal bukanlah bentuk pendidikan sebagaimana yang diminati di kota-kota besar, melainkan suatu bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dalam arti yang secara langsung dapat dinikmati dan mampu mengangkat harkat mereka dengan tanpa menghilangkan identitas kepribadian maupun budayanya. Pendidikan yang menghilangkan identitas kepribadian dan budaya masyarakat, akan menghasilkan warga masyarakat yang akan merasa asing terhadap masyarakatnya sendiri, dan selanjutnya mereka akan meninggalkan masyarakatnya untuk hidup di dalam masyarakat yang telah membentuk budaya dan perilakunya.

Pendidikan sekolah (dahulu disebut pendidikan formal) yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan bahan ajar kota, ternyata telah mendorong tamatannya untuk bermigrasi ke kota. Mereka tidak lagi tertarik untuk mengerjakan pekerjaan di desanya, dan akibat bagi desa, desa kekurangan tenaga kerja muda atau produktif dan terdidik. Sebab yang masih bertahan di desa adalah mereka yang tidak berpendidikan dan atau yang telah tua-tua yang tidak produktif lagi untuk mengerjakan tanah pertanian atau sawah, sehingga kemiskinan tetap berlanjut karena tidak mampu meningkatkan produksi dan membangun kehidupannya. Oleh karena tepatlah jika pemerintah menyadari kelemahan kurikulum sentral dan bermaksud memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum sekolah. Demikian pula keinginan agar pendidikan berlandaskan keterkaitan dan kepadanan (link and match) atau relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakatnya sehingga hasil pendidikan tidak "muspro" dengan menghasilkan pengangguran terdidik seperti yang terjadi pada saat ini, di mana jumlahnya semakin besar. Memang harus diakui bahwa demi demokrasi dalam pendidikan, kita tidak boleh membatasi hak akan pendidikan bagi semua warga, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama baik secara akademik maupun sosial ekonominya. Oleh karena itu bagi mereka yang memang memiliki kemampuan memadai yang dipersyaratkan untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi diberi kesempatan, tetapi bagi mereka yang tidak mampu harus pula diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang memang cocok bagi kebutuhannya. Bentuk pendidikan yang selalu dapat disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemajuan masyarakat lokal, adalah bentuk pendidikan luar sekolah yang sangat memiliki sifat keluwesan (fleksibilitasnya tinggi). Ada empat macam jenis pendidikan luar sekolah yang lazim dipakai di dalam dunia pendidikan luar sekolah, yaitu:

1. Pendidikan yang sifatnya mendasari (basic education) yang diarahkan untuk mencapai pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama)
2. Pendidikan untuk meningkatkan kehidupan keluarga (kualitas)
3. Pendidikan untuk meningkatkan kehidupan kelembagaan masyarakat
4. Pendidikan untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan bagi dirinya maupun untuk orang lain

Bentuk pertama yang paling mendasar adalah program paket A yang dahulu dikenal dengan program pemberantasan buta huruf, kemudian dikembangkan menjadi program B3B (membaca, menulis dan berhitung serta mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia). Dengan program paket A diharapkan warga belajar akan mampu secara akademik untuk memperoleh ijazah persamaan Sekolah Dasar yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan seterusnya yang lebih tinggi. Bagi masyarakat tertinggal yang belum membutuhkan pendidikan setara dengan sekolah dasar, tujuan dan hakekat dari program pendidikan melek huruf fungsional (functional literacy) kiranya masih relevan. Rumusan lengkap yang dikemukakan Carmant St. John Hunter (1979. p.7) berbunyi:

"Functional literacy: the possession of skill perceived as necessary by particular persons and groups to fulfill their own self-determined objectives as family and community members, citizens, consumers, job-holders, and members of social religious, or other associations of their choosing. This includes the ability to obtain information they want and to use that information for their own and others' well being; the ability to read and write adequately to satisfy the requirements they set for them selves as being important for their own lives; the ability to deal positively with demands made on them by society; and the ability to solve the problems they face in their daily lives".

Dengan melihat tujuan tersebut, maka program literasi fungsional bukanlah sekedar mencapai melek huruf secara formal sebagaimana yang pernah terjadi pada waktu lampau, di mana

setelah diberantas beberapa bulan kemudian mereka kembali menjadi buta huruf lagi. Hal ini berarti isi program paket A perlu dikaji kembali apakah tamatannya benar-benar telah memiliki kemampuan dasar yang disebutkan di atas (kemampuan memperoleh informasi yang berharga baginya, kemampuan membaca dan menulis yang memadai/sesuai dengan kepentingannya, kemampuan menanggapi secara positif terhadap tuntutan/kebutuhan masyarakatnya, dan kemampuan untuk memecahkan problem di dalam kehidupannya sehari-hari). Oleh karena kebutuhan masing-masing masyarakat berbeda sesuai dengan mata pencaharian pokoknya, maka isi program paket A juga harus berorientasi kepada klien warga belajar yang harus dilayani, sehingga informasi yang disampaikan lewat isi paket A akan relevan dengan kebutuhan dan kehidupan mereka dan akan dirasakan kemanfaatannya secara langsung. Bagi daerah tertinggal yang mendasarkan kehidupannya pada suatu jenis pekerjaan tertentu isi wacana dan informasi yang disampaikan harus relevan dan dengan informasi tersebut mereka tergerak untuk berfikir dan berupaya mengatasi atau memperbaikinya hal-hal yang masih di dalam batas kemampuan dan jangkauannya. Misalnya masyarakat Tepus yang setiap tahun dilanda kekeringan, tanah menjadi retak-retak dan tidak mungkin ditanami pada musim kemarau tersebut, tidak mungkin disarankan untuk membeli hujan buatan atau membuat waduk besar. Tetapi pemberian keterampilan yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan pekerjaan bertani baik dikerjakan di rumah sendiri maupun ke tempat lain akan lebih realistis.

Bentuk kedua yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan keluarga seperti program pendidikan dalam keluarga berencana, kesehatan dan gizi, kesejahteraan keluarga, bina balita; lingkungan sehat dan lain sebagainya. Program ini biasanya yang menjadi warga belajar adalah para ibu rumah tangga/wanita dengan asumsi bahwa ibu rumah tangga atau wanita yang secara langsung mengurus anak dan mengatur kehidupan di dalam keluarga. Mengingat banyaknya lembaga yang mengadakan program yang sama atau sejenis, maka perlu koordinasi di dalam perencanaan serta pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang sifatnya formalitas, asal jalan dan ada laporan keatas, tetapi kualitas hasil rendah. Ibu rumah tangga atau wanita warga belajar hanya disibukkan dengan banyak kegiatan tetapi tidak sempat untuk menguasai dan menerapkannya. Sebagai contoh program keterampilan menjahit, dari Departemen Sosial punya, Departemen

temen P dan K lewat Penmas juga punya, BKKBN juga punya, Departemen Dalam Negeri juga lewat program PKK, syukurilah sekarang telah disadari sehingga warga belajar tidak bingung dengan banyaknya program yang harus diikuti.

Bentuk ketiga program pendidikan untuk meningkatkan kelembagaan di dalam masyarakat. Dengan semakin maju dan kompleksnya kehidupan, maka semakin banyak pula tuntutan akan adanya kelembagaan di dalam masyarakat dan juga menuntut pengelolaan secara profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Kelembagaan yang ada di dalam masyarakat pedesaan/kampung seperti koperasi simpan pinjam, KUD, LKMD, KSM, Organisasi kemasyarakatan atas dasar pekerjaan, profesi, keagamaan, sosial, budaya, olah raga dan lain sebagainya membutuhkan kepengurusan atau orang-orang yang secara profesional dapat memimpin dan mengelola dengan cara yang efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan pendidikan-pelatihan. Pendidikan luar sekolah harus mampu menjawab kebutuhan semacam ini dengan program pendidikan pelatihan manajemen. Contoh kecil dibentuknya koperasi KUD, PIR jika tidak dibarengi dengan kepelatihan manajemen dan keterampilan yang relevan tujuan koperasi tidak akan dapat dicapai, dan justru sebaliknya akan membuat jera warga masyarakat untuk ikut menjadi anggota koperasi karena bukan keuntungan yang diperoleh tetapi kerugian atau petaka.

Bentuk keempat yang bertujuan untuk memperoleh pekerjaan dan atau menciptakan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain. Jenis pendidikan ini lebih dikenal dengan kursus atau pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam berbagai departemen maupun lembaga swasta. Bagi masyarakat yang hidup di daerah tertinggal, jenis kursus haruslah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan akademik dan kemampuan keuangannya. Model program pendidikan pelatihan keliling (*mobile training unit*) yang dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah ideal karena masyarakat tidak dibebani biaya akomodasi dan transport yang tidak mungkin mereka bayar karena kemiskinannya. Untuk negara kita, daerah-daerah tertinggal umumnya sulit dijangkau dan terletak tersebar lokasinya, sehingga dari segi pengoperasian menjadi sangat tinggi. Ini merupakan dilema bagi instansi yang mempunyai dana terbatas seperti Direktorat Pendidikan Masyarakat. Tanpa dana patungan kiranya akan sulit direalisasikan impian mengadakan program pelatihan keliling tersebut.

Secerach harapan bagi Pendidikan Masyarakat ialah dengan akan adanya Inpres Desa Tertinggal yang dalam program pengentasan kemiskinan akan melalui pengembangan sumber daya manusia, ini berarti jalur pendidikan luar sekolah akan mempunyai peran penting. Diyakini bahwa kemiskinan-kemelaratan, kebodohan-kemalasan serta sikap pasrah pada situasi hanya akan dapat diatasi dari dalam diri mereka sendiri. Gambaran kemiskinan yang diutarakan oleh Mubyarto (1993) secara gamblang dalam makalahnya berbunyi:

" Kenyataan yang melekat pada diri orang miskin pada umumnya adalah kurang pendidikan, kurang sehat, kurang luas lingkup pergaulannya, yang kesemuanya menyebabkan mereka tidak dapat menciptakan akses kepada sumber-sumber daya pembangunan. Secara demikian, orang miskin dipaksa oleh kenyataan dirinya untuk terasing dari proses pembangunan."

(Mubyarto, 1993.p.1)

Atas dasar gambaran tersebut, maka upaya pengentasan kemiskinan adalah membangkitkan kemampuan agar si miskin mampu memperoleh dan menciptakan akses sumber-sumber daya pembangunan, dan dengan akses tersebut mereka akan mampu bangkit atau mengentaskan dirinya dan kehidupannya dari kemiskinan baik secara kultural maupun struktural.

Kemiskinan kultural adalah merupakan keadaan yang diciptakan dan dilestarikan oleh mereka si miskin karena kemiskinannya. Makna kebudayaan kemiskinan menurut Supardi Suparlan (1993) menunjuk pada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam konteks sejarah dan sistem sosial tertentu. Di dalam tulisan Paul Willis (19..) digambarkan pula bagaimana proses pewarisan kebudayaan miskin para buruh di Inggris melalui suatu generasi ke generasi berikutnya selama puluhan tahun. Sekolah yang diadakan di daerah pemukiman para buruh tidak mampu mengangkat anak-anak buruh untuk lepas dari kebudayaan buruh yang miskin, dan akhirnya sekolah hanya berfungsi adaptif terhadap lingkungannya. Proses tersebut digambarkan dalam bukunya yang terkenal "Learning to Labour". Untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan ini, maka pendidikan luar sekolah harus secara terpadu dan serentak menggarap semua warga masyarakat miskin untuk secara bersama-sama dan sendiri-sendiri mengubah kehidupan dan kebudayaan kemiskinan yang menyelimuti dengan hangatnya selama ini.

Kebudayaan kemiskinan sering dipakai sebagai selimut untuk menutupi ketidakmampuan dan keberdayaannya di dalam mengatasi problem kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu selimut kebudayaan kemiskinan harus mereka buang sendiri dengan membangkitkan kemampuan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Pendidikan bagi daerah tertinggal, bukanlah pendidikan yang sekedar untuk dapat hidup dan mempertahankannya (*survive and sustaine*) tetapi harus mampu mengangkat harkat kehidupannya ke arah yang seharusnya sesuai dengan derajat kemanusiaannya yang luhur sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi.

Pendekatan Pendidikan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pada saat ini semakin disadari bahwa pendekatan dari satu segi saja tidaklah mencukupi untuk mengatasi kehidupan miskin di daerah tertinggal. Pendekatan ekonomi dengan memberikan bantuan modal lewat berbagai macam kredit, justru di beberapa daerah menimbulkan masalah baru, kredit macet, dan mereka terancam kehilangan tanah agunannya. Pemberian bantuan berupa sarana fisik juga sering menjadi mubazir karena masyarakat yang diberi tidak mampu mendayagunakan dan memeliharanya dengan baik, karena tidak memiliki dana untuk itu. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa pendekatan pendidikan di dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dipandang lebih strategis untuk program pengentasan kemiskinan. Pendekatan pendidikan yang kiranya dapat dipakai untuk program pengentasan kemiskinan tersebut adalah:

1. Reorientasi dan restrukturisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah lanjutan pertama. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama (yang akan menjadi pendidikan dasar 9 tahun) berada di desa atau paling tidak berada di ibu kota Kecamatan, sehingga kehidupan sekolah tidak lepas dari kehidupan masyarakat desa. Kedua, dari data statistik pendidikan menunjukkan bahwa jumlah tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama di daerah pedesaan (lebih-lebih desa tertinggal) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar, dan mereka kembali hidup di desa atau pergi ke kota mengadu nasib. Jika pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak memiliki kemanfaatan praktis, mereka akan cenderung melupakan sehingga mubazir.

Banyak diantara tamatan sekolah dasar yang kembali buta huruf setelah beberapa tahun, dan lebih-lebih yang tidak sampai tamat lebih cepat menjadi buta huruf kembali. Oleh karena itu reorientasi kurikulum dimaksudkan untuk mengkaitkan kurikulum dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai praktis di dalam kehidupan mereka yang bersifat ekonomik. Dengan demikian kepergian si anak ke sekolah tidak dipandang sebagai kerugian atau kehilangan nilai ekonomik (*earning forgone*), tetapi dengan bersekolah nilai ekonomiknya akan bertambah. Jadi orang tua dapat menikmati keuntungan yang diperoleh anak dengan bersekolah. Konsep *link and match* dapat diterapkan melalui pemasukan nilai praktis kurikulum muatan lokal maupun mata pelajaran yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Sedang restrukturisasi kurikulum berarti kurikulum yang terlalu sarat dengan bebas teoretik akademik perlu diseimbangkan dengan kenyataan kondisi masyarakat di mana sekolah diselenggarakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dengan tanpa mengabaikan kualitas hasil pendidikan.

2. Peningkatan efektivitas pembelajaran orang dewasa khususnya di dalam pelaksanaan paket A, KBU, kursus dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum pernah mendapat pendidikan sekolah dan atau yang berpendidikan rendah yang tidak mampu belajar sendiri secara mandiri, tetapi memerlukan pendampingan. Proses belajar orang dewasa memerlukan waktu relatif lebih lama, dan hasil pendidikan tidak dapat segera nampak dirasakan. Oleh karena itu perlu strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Maka adaptasi dan modifikasi sistem dan cara atau metodologi pembelajaran diperlukan. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan kajian terhadap metode yang selama ini dianggap cocok bagi siapa saja.
3. Penerapan konsep pendidikan sepanjang hayat secara nyata di dalam bentuk program-program pendidikan dan pelatihan. Dengan pendekatan ini para warga belajar akan memahami secara keseluruhan proses pendidikan yang bakal terjadi dan dapat dialaminya jika mereka berkehendak terus menerus mengembangkan diri. Pendidikan luar sekolah tidak dipandang sebagai segment atau lapisan, tetapi akan dipandang sebagai wahana atau kendaraan pengembangan diri sepanjang hayat. Dengan demikian warga belajar akan

mempunyai harapan bahwa sekalipun masyarakat terus berkembang dengan kemajuan teknologinya, mereka tidak akan merasa ditinggalkan, sebab pendidikan luar sekolah selalu tersedia sebagai kendaraan untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi mereka akan tetap dapat beradaptasi dengan tuntutan kemajuan teknologi, sehingga dapat "survive and sustain" di dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleksuntutannya.

4. Penerapan konsep pembelajaran secara kolaboratif dan partisipatif di mana warga belajar dan pihak pengajar/pelatih secara bersama-sama terlibat di dalam kegiatan belajar. Dengan konsep ini warga belajar merupakan subjek belajar, bukan sebagai orang yang berada di bawah (subordinate) yang kedudukannya hanya melaksanakan perintah, petunjuk, nasehat, dianggap tidak atau belum tahu apa-apa. Dalam konsep belajar sebagai rekan atau partner kerja belajar yang berkedudukan sejajar. Inilah kiranya yang menjadi ciri utama di dalam pembelajaran orang dewasa. Sebab dapat terjadi warga belajar di dalam pengalaman praktik lebih banyak dibandingkan dengan pihak pengajar, maka pengajar akan dapat mengambil pengalaman warga belajar dan mengkonseptualisasikan untuk dijadikan bahan ajar. Pengajar harus mampu memanfaatkan apa yang dimiliki warga belajar untuk diolah kembali menjadi bahan belajar bagi warga belajarnya. Dalam konsep ini terkandung pula pemikiran dari warga untuk warga dan oleh warga belajar agar mereka dapat mandiri, sekalipun di dalam proses mereka membutuhkan pendamping belajar pada tahap awal. Untuk penerapan konsep tersebut diperlukan perubahan sikap dari para pengajar/pelatih sendiri bagaimana memperlakukan warga belajar dewasa sebagai rekan atau partner kerja-belajar yang memiliki kedudukan sejajar. Sebagai pendidik luar sekolah kiranya merupakan hal yang wajar dan seharusnya.

Kesimpulan

Pendidikan luar sekolah dengan keluwesan akan mampu berperan secara berarti di dalam program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, jika program yang disajikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata desa dan masyarakat tertinggal tersebut. Untuk itu diperlukan strategi dan pendekatan-pendekatan yang cocok agar konsep-konsep pembelajaran orang dewasa dapat diterapkan.

Fungsi pendidikan luar sekolah bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi-sosialisasi dengan situasi dan kondisi yang ada dan secara pasif menunggu kesempatan yang diberikan pihak lain, tetapi dapat mengembangkan diri untuk kemampuan menciptakan kesempatan dan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimilikinya. Dengan demikian melalui pendidikan luar sekolah mereka akan terbangkit untuk berpartisipasi di dalam pembangunan guna mengentaskan dirinya dan masyarakatnya dari kemiskinan baik kultural maupun struktural.

---oOo---

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs. Philip H & Ahmed Manzoor (1974) "*Attacking Rural Poverty How Nonformal Education can Help*", Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Garman, Rt. John Hunter & David Harman (1979) "*Adult Illiteracy in The United States*". New York: McGraw Hill Book Company.
- Mubyarto (1993). "*Konperensi Mexico Tentang Pembangunan Sosial dan Kemiskinan*", Makalah Seminar. PSK-UGM.

---oOo---